

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Desa merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan nasional yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara mandiri dan berkelanjutan. Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan keleluasaan bagi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, termasuk dalam hal pengelolaan ekonomi desa. Kebijakan ini mendorong desa untuk tidak hanya berfungsi sebagai wilayah administratif, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal yang produktif dan berkelanjutan. Salah satu bentuk konkret dari kebijakan tersebut adalah pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang bertujuan untuk mengelola potensi ekonomi lokal secara profesional demi kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes hadir sebagai motor penggerak ekonomi lokal dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh desa, seperti sumber daya alam, budaya, dan sosial. Sinarwati *et al.* (2023) menyatakan bahwa “*BUMDes have a strategic role to build village entrepreneurs*”, yang menunjukkan bahwa BUMDes memiliki peran strategis dalam mendorong tumbuhnya kewirausahaan desa sebagai upaya mewujudkan desa yang mandiri dan berdaya saing. Keberhasilan pengelolaan BUMDes sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola keuangan yang diterapkan, terutama dalam penyusunan laporan keuangan yang akurat, transparan, dan akuntabel. Laporan keuangan yang berkualitas menjadi dasar pengambilan keputusan manajerial, evaluasi

kinerja usaha, serta bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah desa dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan.

Menurut Musmini *et al.* (2024) pengelolaan pencatatan keuangan BUMDesa adalah salah satu unsur penting dalam pengelolaan organisasi karena mampu membantu mencatat transaksi keuangan secara akurat dan menghasilkan laporan keuangan yang relevan. Laporan keuangan yang disusun dengan baik dapat memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan dan aktivitas operasional BUMDes dalam suatu periode tertentu, sehingga menjadi dasar bagi pengelola dalam pengambilan keputusan. Namun, dalam praktiknya, pencatatan keuangan BUMDes masih sering dilakukan secara sederhana dan belum sepenuhnya mengacu pada standar akuntansi yang berlaku.

Salah satu pendekatan yang direkomendasikan untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan adalah penerapan akuntansi berbasis akrual. Regulasi pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan juga menegaskan pentingnya penerapan basis akrual untuk menghasilkan informasi yang lebih relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Basis akrual mengakui transaksi pada saat hak dan kewajiban timbul sehingga mampu menyajikan gambaran posisi keuangan yang lebih komprehensif dibandingkan dengan basis kas yang hanya mencerminkan arus kas yang terjadi. Seperti menurut Sinarwati & Suarmanayasa (2023) *“The establishment of BUMDes is the implementation of productive economic management of the village’s potency being carried out in transparent, accountable, cooperative, emancipation, participatory, and sustainable*

way.” Pernyataan tersebut menegaskan bahwa tata kelola yang baik merupakan fondasi utama dalam operasional BUMDes. Oleh sebab itu, sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang andal menjadi elemen penting untuk mendukung keberlangsungan serta kredibilitas BUMDes.

Dalam konteks akuntansi berbasis akrual, salah satu akun yang paling krusial adalah akun piutang. Piutang merupakan aset yang timbul akibat transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit, yang memberikan hak bagi entitas untuk menerima kas di masa mendatang. Dalam kegiatan operasional BUMDes, piutang dapat timbul dari berbagai aktivitas usaha seperti penjualan barang atau jasa secara kredit maupun pemberian layanan yang pembayarannya dilakukan secara berkala. Keberadaan piutang mencerminkan adanya hak ekonomi yang dimiliki oleh BUMDes dan menjadi bagian dari aset yang harus dicatat dan disajikan secara tepat dalam laporan keuangan.

Apabila pencatatan piutang tidak dilakukan secara tepat, maka informasi mengenai nilai aset yang dimiliki oleh BUMDes dapat menjadi tidak akurat. Selain itu, pengelolaan piutang yang kurang baik juga dapat menimbulkan berbagai risiko seperti keterlambatan penagihan, ketidakjelasan jumlah piutang yang harus diterima, serta potensi terjadinya piutang tak tertagih. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kinerja keuangan BUMDes serta menurunkan tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Tanpa pencatatan yang sistematis, pengelola juga akan mengalami kesulitan dalam mengetahui umur piutang serta tingkat kelancaran pembayaran dari pihak yang berutang.

Fenomena tersebut juga dapat ditemukan pada BUMDes Giri Amertha Desa Sambangan yang merupakan salah satu BUMDes di Kabupaten Buleleng. BUMDes ini mengelola beberapa unit usaha yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat. Aktivitas usaha tersebut menimbulkan berbagai transaksi keuangan yang berpotensi menghasilkan piutang sebagai hak ekonomi yang dimiliki oleh BUMDes dan harus dikelola serta dicatat secara sistematis dalam laporan keuangan. Namun berdasarkan hasil observasi awal, pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan masih bersifat sederhana dan belum sepenuhnya menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual, khususnya dalam pengakuan, pengukuran, dan penyajian akun piutang dalam laporan keuangan.

Selain itu, proses pencatatan keuangan masih dilakukan oleh pengelola yang tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi. Hal ini sejalan dengan penelitian Indrawan & Dewi (2022) yang menyatakan bahwa banyak pengelola BUMDes belum memiliki pemahaman memadai mengenai prinsip-prinsip akuntansi sehingga laporan keuangan yang dihasilkan sering tidak tepat waktu serta belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang berlaku. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Made Arsana sebagai Bendahara BUMDes Sambangan pada Senin, 28 Juli 2025 di Kantor BUMDes Sambangan terkait keterbatasan pemahaman akuntansi akrual.

“Pemahaman terhadap akuntansi berbasis akrual masih terbatas sehingga pencatatan yang dilakukan cenderung bersifat praktis dan belum sepenuhnya mengikuti prosedur akuntansi yang sistematis.”

Kondisi tersebut menyebabkan informasi mengenai jumlah piutang yang dimiliki BUMDes, waktu penagihan, serta kemungkinan terjadinya piutang tak tertagih belum terdokumentasi secara sistematis. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan piutang pada BUMDes masih memerlukan sistem pencatatan yang lebih terstruktur agar informasi keuangan yang dihasilkan dapat mencerminkan kondisi keuangan secara lebih akurat. Seperti menurut Puspita dan Adiputra, (2023) "*The problems experienced by BUMDes are diverse, starting from cases of fraud in the use of BUMDes funds by irresponsible individuals, lack of understanding of the perpetrators regarding how to manage BUMDes, both capital management, recording financial reports, product marketing, utilization of natural resources in the village and lack of awareness from related parties regarding BUMDes management.*" Pernyataan tersebut menekankan bahwa BUMDes masih mengalami berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan dan pencatatan laporan keuangan sehingga diperlukan pengelolaan yang lebih baik dan sesuai standar akuntansi.

Dengan kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik pencatatan piutang yang dilakukan dengan prinsip pengakuan akuntansi berbasis akrual, terutama dalam aspek waktu pengakuan, pengukuran nilai piutang, serta penyajiannya dalam laporan keuangan. Hal ini disampaikan dengan Ibu Luh Putu Indra Noviarini sebagai Direktur BUMDes Sambangan pada Selasa, 10 Maret 2026, di Kantor BUMDes Sambangan menunjukkan bahwa laporan keuangan disusun berdasarkan bukti transaksi dan diverifikasi secara internal sebelum dilaporkan kepada pemerintah desa,

namun proses pencatatan masih dilakukan secara bertahap dan belum sepenuhnya terintegrasi secara sistematis.

“BUMDes Sambangan menyampaikan laporan keuangan setiap triwulan kepada pemerintah desa melalui rapat evaluasi. Selain itu, hasil usaha dan laporan tahunan juga dipresentasikan dalam musyawarah desa agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan BUMDes. Tahap triwulan yang pertama pada internal pengawasan dan penasehat, yang kedua pra musdes dipimpin oleh pemerintah desa dan BPD, dan yang ketiga itu musyawarah desa disaksikan oleh pemerintah desa, BPD, masyarakat, unit-unit terkait.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa BUMDes Sambangan telah berupaya menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui penyampaian laporan keuangan secara rutin kepada pemerintah desa dan masyarakat. Pelaksanaan rapat evaluasi dan musyawarah desa menjadi bentuk pertanggungjawaban publik atas pengelolaan keuangan BUMDes. Namun demikian, transparansi yang dilakukan belum sepenuhnya didukung oleh kualitas penyajian informasi keuangan yang lengkap sesuai prinsip akuntansi berbasis akrual. Hal ini terlihat dari belum disajikannya akun piutang dalam laporan keuangan, meskipun transaksi kredit telah terjadi dalam kegiatan operasional BUMDes. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik pertanggungjawaban yang telah berjalan dengan penerapan standar akuntansi yang seharusnya diterapkan berdasarkan SAK ETAP.

Dalam perspektif good governance, akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan penyampaian laporan secara rutin, tetapi juga berkaitan dengan kelengkapan dan keandalan informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penerapan pencatatan piutang berbasis akrual menjadi penting agar laporan keuangan dapat mencerminkan kondisi keuangan BUMDes secara lebih objektif.

Dalam penyusunan laporan keuangan, entitas seperti BUMDes termasuk dalam kategori entitas tanpa akuntabilitas publik yang tidak memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang kompleks seperti perusahaan besar. Oleh karena itu, standar yang lebih sesuai digunakan adalah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). SAK ETAP dirancang untuk memberikan pedoman penyusunan laporan keuangan yang lebih sederhana namun tetap mampu menghasilkan informasi keuangan yang relevan dan andal.

SAK ETAP merupakan standar akuntansi yang dirancang khusus bagi entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan, seperti usaha kecil, koperasi, maupun BUMDes. Standar ini memiliki karakteristik yang lebih sederhana dibandingkan standar akuntansi untuk entitas publik sehingga lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh entitas dengan keterbatasan sumber daya manusia di bidang akuntansi. Melalui penerapan SAK ETAP, setiap transaksi usaha BUMDes, termasuk transaksi yang menimbulkan piutang, dapat diakui, diukur, dan disajikan secara lebih sistematis dalam laporan keuangan.

Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian Astawa & Dewi (2021) yang menyatakan bahwa meskipun prinsip akuntabilitas dan transparansi telah diterapkan melalui mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban, sistem pencatatan masih sederhana karena belum terdapat pemisahan yang jelas antara kas masuk dan kas keluar. Bapak Made Arsana sebagai Bendahara BUMDes Sambangan pada Senin, 28

Juli 2025 di Kantor BUMDes Sambangan juga menyampaikan bahwa keterbatasan pemahaman akuntansi dan belum adanya sistem pencatatan terintegrasi menjadi kendala utama dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.

“Karena latar belakang pendidikan saya bukan dari keilmuan ekonomi ataupun akuntansi, jadi saya hanya mengetahui akuntansi ataupun ekonomi secara umum saja, kalau untuk mengetahui akuntansi berbasis akrual itu mencatat transaksi saat terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayarkan.”

Hal ini menunjukkan bahwa implementasi akuntansi berbasis akrual pada level BUMDes masih menghadapi kendala struktural maupun teknis, terutama dalam hal kompetensi sumber daya manusia dan penggunaan sistem pelaporan keuangan yang memadai.

Berdasarkan fenomena tersebut, laporan keuangan BUMDes Sambangan masih menunjukkan keterbatasan dalam mencerminkan penerapan akuntansi piutang berbasis akrual sesuai dengan ketentuan SAK ETAP. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik pencatatan yang dilakukan dengan standar akuntansi yang seharusnya diterapkan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis implementasi akuntansi piutang berbasis akrual melalui penelaahan praktik pencatatan dan penyajian akun piutang serta perbandingannya dengan ketentuan SAK ETAP. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kesesuaian penerapan akuntansi piutang berbasis akrual pada BUMDes Sambangan serta menjadi bahan evaluasi bagi pengelola dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi yang

berlaku dengan judul **“Implementasi Akuntansi Piutang Berbasis AkruaI Berdasarkan SAK ETAP pada BUMDes Sambangan”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan utama dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penerapan akuntansi piutang berbasis akrual pada BUMDes Sambangan belum optimal, ditandai dengan pencatatan piutang yang belum memenuhi prinsip pengakuan, pengukuran, dan penyajian berbasis akrual sesuai SAK ETAP.
2. Sistem pencatatan keuangan yang masih sederhana dan keterbatasan kompetensi sumber daya manusia menyebabkan pengakuan, pengukuran, dan penyajian akun piutang belum tersaji secara lengkap, sistematis, dan sesuai standar akuntansi yang berlaku.
3. Ketidaksesuaian pencatatan piutang tersebut berpotensi menurunkan akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMDes Sambangan, yang ditunjukkan oleh keterlambatan penagihan piutang, belum dilakukannya analisis umur piutang, serta nilai piutang dalam laporan keuangan yang belum sepenuhnya mencerminkan hak ekonomi BUMDes secara akrual.

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Penelitian ini difokuskan untuk mendeskripsikan proses akuntansi piutang berbasis akrual berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada BUMDes Giri Amertha, Desa Sambangan. Fokus penelitian meliputi pengakuan, pengukuran, dan penyajian akun piutang dalam laporan keuangan,

serta kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi berbasis akrual. Selain itu, penelitian ini juga membahas kendala yang dihadapi dalam penerapannya, khususnya yang berkaitan dengan sistem pencatatan keuangan dan kompetensi sumber daya manusia, serta implikasinya terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMDes. Data penelitian diperoleh melalui deskripsi naratif berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumen.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi akuntansi piutang berbasis akrual pada BUMDes Sambangan berdasarkan SAK ETAP?
2. Bagaimana kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan penyajian akun piutang BUMDes Sambangan dengan ketentuan SAK ETAP?
3. Apa saja kendala yang dihadapi BUMDes Sambangan dalam menerapkan akuntansi piutang berbasis akrual?
4. Bagaimana penerapan akuntansi piutang berbasis akrual tersebut berkontribusi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMDes Sambangan?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka terdapat tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan implementasi akuntansi piutang berbasis akrual pada BUMDes Sambangan berdasarkan SAK ETAP.

2. Untuk menganalisis kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan penyajian akun piutang dengan ketentuan SAK ETAP.
3. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapan akuntansi piutang berbasis akrual di BUMDes Sambangan.
4. Untuk mengetahui kontribusi penerapan akuntansi piutang berbasis akrual terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMDes Sambangan.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, peneliti ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

#### **1. Manfaat Akademis**

Bagi peneliti mahasiswa jurusan akuntansi, peneliti ini berguna untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman serta menambah referensi mengenai penelitian yang berkaitan dengan penerapan akuntansi berbasis akrual khususnya akuntansi sektor publik dan akuntansi BUMDes, terkait implementasi akuntansi piutang berbasis akrual berdasarkan SAK ETAP. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas penerapan akuntansi akrual pada lembaga ekonomi desa.

#### **2. Manfaat Praktisi**

##### **a. Bagi Pengelola BUMDes Sambangan**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan akun piutang agar sesuai dengan prinsip akuntansi

berbasis akrual dan ketentuan SAK ETAP, sehingga pengelolaan keuangan BUMDes menjadi lebih tertib, profesional, dan akuntabel.

b. Bagi Aparat Desa Sambangan

Bagi aparat Desa Sambangan, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan strategis dalam merumuskan kebijakan dan program pembinaan BUMDes, khususnya di bidang keuangan. Hasil penelitian dapat dimanfaatkan untuk menyusun regulasi internal yang mendukung kelancaran penerapan akuntansi berbasis akrual, merencanakan alokasi anggaran pelatihan teknis bagi SDM BUMDes, serta memperkuat fungsi pengawasan keuangan desa agar lebih data lebih akurat.

c. Bagi Masyarakat Desa

Bagi masyarakat desa, penelitian ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya transparansi dan partisipasi dalam pengawasan pengelolaan keuangan BUMDes, khususnya terkait pengelolaan akun piutang. Dengan tersedianya informasi piutang yang disajikan secara akuntabel dan sesuai dengan prinsip akuntansi berbasis akrual, masyarakat dapat memahami kondisi keuangan BUMDes secara lebih objektif, meningkatkan kepercayaan terhadap kinerja pengelola, serta berperan aktif dalam mengawasi penggunaan dan pengelolaan hak ekonomi BUMDes. Penerapan tata kelola keuangan yang baik pada akhirnya diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pengelolaan usaha desa yang lebih tertib, profesional, dan berkelanjutan.

d. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan serta wawasan mahasiswa serta mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai konsep akuntansi berbasis akrual di BUMDes sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian berikutnya.

e. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini memperkaya literatur empiris di bidang akuntansi sektor publik, khususnya terkait praktik akuntansi di lembaga ekonomi lokal seperti BUMDes. Bagi mahasiswa dan peneliti, penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam studi kasus, penyusunan skripsi, tesis, maupun publikasi ilmiah. Penelitian ini juga membuka ruang kajian lebih lanjut mengenai integrasi akuntansi akrual dengan sistem informasi keuangan desa, serta pengaruhnya terhadap efektivitas pengelolaan keuangan publik di tingkat mikro.

